

Rabu, 9 Mei 2012

BERKAT
BERTAKHATULISTIWA

Tata Kelola Asset Pemprov

Retno: Tindaklanjuti Hasil Audit Khusus BPK-RI

Pontianak, BERKAT.

Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) supaya melakukan langkah-langkah konkrit untuk menindaklanjuti hasil audit khusus BPK-RI terhadap penilaian dan tata kelola asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Hal tersebut diungkapkan anggota Pansus Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar 2011 DPRD Provinsi Kalbar, H. Retno Pramudya, SH, kepada sejumlah wartawan, baru-baru ini. Retno mengharapkan eksekutif agar segera mendata kepemilikan dan membuat sertifikat asset tanah milik Pemerintah Provinsi Kalbar karena diduga masih banyak tanah milik Pemerintah Provinsi Kalbar yang belum memiliki sertifikat.

"Kita tidak menginginkan ada pihak lain yang menguasai tanah milik Pemerintah

Provinsi Kalbar, baik pihak internal maupun eksternal," ujarnya.

Ia menginginkan agar pemerintah mendata semua asset tanah milik provinsi dengan melakukan pemetaan dan pemancangan dengan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Kalbar.

"Tanah yang sudah dibebaskan akan dipasang patok dan dibuat sertifikat semunya," ujar Retno yang juga Sekrelais Fraksi PPP DPRD Kalbar.

Menurutnya, penangan bidang pertanahan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah baik itu provinsi kabupaten/kota (sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007) yang didalamnya terdapat 9 kewenangan, yaitu ijin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan,

penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentece, penetapan tanah ulayat, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, ijin membuka lahan, dan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Untuk itulah Retno mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar dinilai berhasil dalam hal pengamanan asset Pemerintah Provinsi, karena baru mau dimulai dengan melaksanakan sertifikasi Tanah Asset Pemerintah Provinsi yang dalam pelaksanaannya dibuat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Kantor Pertanahan Kalbar tentang pengurusan hak atas tanah dan penyelesaian sertifikat tanah atas nama



RETNO PRAMUDYA.

Pemerintah Provinsi Kalbar.

"Wajar Dengan Pengecualian dibentarkan karena BPK pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar masih menyebutkan adanya temuan seperti reevaluasi asset yang belum beres, penatausahaan yang masih lemah, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada dinas atau instansi yang belum lengkap, dan dalam temuan administrasi kekayaan negara lain," katanya. (aca)